



# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA**

### **DPRD KABUPATEN MALANG**

**HARI : RABU**

**TANGGAL : 15 MEI 2024**

**PUKUL : 13.00 WIB**

**TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA**

**AGENDA : PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM  
FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN  
MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

## A. PIMPINAN RAPAT



**NAMA** : DARMADI, S.Sos  
**Jabatan** : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

## B. SEKRETARIS RAPAT



**NAMA** : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si  
**Jabatan** : SEKRETARIS RAPAT

### C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT, SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN, S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA

47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
<b>Jumlah</b>		<b>50 orang</b>	<b>8 PARTAI</b>

#### **D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG**



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

#### **RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA**

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 32 ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF C, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA

DENGAN MENGUCAP “**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM**“ RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, RABU, 15 MEI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA ..... **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG;

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN IPEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN, MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERLIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S.A.W BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI JUGA MEMBERIKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI MALANG, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

***RAPAT PARIPURNA, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,***

SESUAI DENGAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MALANG TANGGAL 8 MEI 2024, MAKA PADA HARI INI, RABU, TANGGAL 15 MEI 2024 DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA “**PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**”.

***RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRAN YANG BERBAHAGIA,***

UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN....

***.....Proses Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.***

***oleh Juru Bicara DPRD.....***



***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh***

*Yang terhormat*

- SAUDARA BUPATI MALANG;
- SAUDARA WAKIL BUPATI MALANG;
- SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
- PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG;
- SAUDARA Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; SERTA
- REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN, UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas nikmat dan hidayah-Nya semata, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan penerus perjuangannya hingga akhir zaman.

***Rapat Paripurna dan Hadirin sekalian yang kami hormati,***

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi-Fraksi di DPRD, untuk menyampaikan Pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, dimana telah disepakati bahwa penyampaian Pandangan Umum Fraksi dilakukan secara bersama dan menunjuk saya sebagai juru bicara.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, pada Rapat Paripurna Hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024 yang lalu.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang secara konstitusional harus disampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran sekaligus dalam rangka memenuhi salah satu tugas Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana disebutkan dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf d, bahwa *“Kepala Daerah bertugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama”*.

Disamping itu juga untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VIII dimana *“Bupati menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir”*.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

***Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang berbahagia,***

Dalam penyampaian Saudara Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 disampaikan bahwa :

1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 4 Triliun 375 Miliar 225 Juta 182 Ribu 406 Rupiah 89 Sen atau 97,19%;
2. Realisasi Belanja sebesar 4 Triliun 303 Miliar 906 Juta 80 Ribu 736 Rupiah 83 Sen, atau 91,46%;
3. Penerimaan Pembiayaan sebesar 216 Miliar 131 Juta 392 Ribu 318 Rupiah 25 Sen;
4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar 12 Miliar Rupiah;
5. Pembiayaan Netto sebesar 204 Miliar 131 Juta 392 Ribu 318 Rupiah 25 Sen;
6. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 275 Miliar 450 Juta 493 Ribu 988 Rupiah 31 Sen.

***Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati,***

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 mencapai 97,19 persen, dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4 Triliun 375 Miliar 225 Juta 182 Ribu 406 Rupiah.

Secara umum kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara Bupati beserta seluruh Perangkat Daerah yang telah bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang tentunya diharapkan dapat membantu realisasikan program kegiatan pemerintahan. Realisasi yang cukup tinggi tersebut dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Kami tetap mendorong agar Saudara Bupati terus memacu kinerja Perangkat Daerah dalam upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka program-program pembangunan yang telah dicanangkan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, dengan Tema Pembangunan **“Pembangunan Pariwisata Kreatif (Pariwisata dan Industri Kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal”**.

Dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tersebut, kami harapkan Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya mengoptimalkan program-program yang efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan anggaran yang efisien. Oleh karena itu perencanaan anggaran Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran Pembangunan Daerah tersebut harus menerapkan prinsip Efisiensi, Efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta terukur.

***Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati,***

Mencermati apa yang telah disampaikan Saudara Bupati, pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, beberapa hal yang perlu kami sampaikan antara lain:

1. Pada penyampaian Saudara Bupati bahwa Sisi **Pendapatan Daerah** direncanakan sebesar 4 Triliun 501 Miliar 832 Juta 816 Ribu 808 Rupiah, terealisasi sebesar 4 Triliun 375 Miliar 225 Juta 182 Ribu 406 Rupiah 89 Sen atau 97,19%, yang terdiri dari:
  - a. **Pendapatan Asli Daerah** dengan target sebesar 1 Triliun 25 Miliar 586 Juta 55 Ribu 284 Rupiah, terealisasi sebesar 838 Miliar 906 Juta 956 Ribu 543 Rupiah 89 Sen atau 81,80%;
  - b. **Pajak Daerah** target sebesar 476 Miliar 666 Juta 164 Ribu 778 Rupiah, terealisasi sebesar 454 Miliar 120 Juta 555 Ribu 692 Rupiah atau 95,27%;
  - c. **Retribusi Daerah** target sebesar 119 Miliar 529 Juta 323 Ribu 105 Rupiah, realisasi sebesar 34 Miliar 597 Juta 374 Ribu 72 Rupiah atau 28,94%, ini perlu penjelasan apakah target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga capaian sangat jauh dari harapan atau memang ada kendala lain.

- d. **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan** dengan target 46 Miliar 849 Juta 399 Ribu 240 Rupiah dengan realisasi sebesar 25 Miliar 482 Juta 15 Ribu 537 Rupiah 5 Sen atau 54,39%; dan
  - e. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** dengan target sebesar 382 Miliar 541 Juta 168 Ribu 161 Rupiah, realisasi sebesar 324 Miliar 707 Juta 11 Ribu 242 Rupiah 84 Sen atau 84,88%.
  - f. **Penerimaan dari Pendapatan Transfer** target Tahun Anggaran 2023 sebesar 3 Triliun 178 Miliar 842 Juta 234 Ribu 524 Rupiah, realisasi sebesar 3 Triliun 239 Miliar 566 Juta 166 Ribu 862 Rupiah atau 101,91%.
  - g. **Penerimaan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah** dengan target anggaran sebesar 297 Miliar 404 Juta 527 Ribu Rupiah, realisasi sebesar 296 Miliar 752 Juta 59 Ribu 1 Rupiah atau 99,78%.
2. Sebagaimana yang tertera dalam neraca daerah 31 Desember 2023, Aset pada Tahun Anggaran 2023 mencapai 6 Triliun 121 Miliar 381 Juta 824 Ribu 385 Rupiah 3 Sen mengalami kenaikan sebesar 3,96%, dari sisi Kewajiban pada tahun 2023 sebesar 46 Miliar 493 Juta 732 Ribu 37 Rupiah 88 Sen, mengalami penurunan sebesar 35,05%, dari sisi Ekuitas, kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2023 sebesar 6 Triliun 74 Miliar 888 Juta 92 Ribu 347 Rupiah 15 Sen, atau mengalami kenaikan sebesar 4,44%.
  3. Terdapat Surplus sebesar 74 Miliar 876 Juta 890 Ribu 121 Rupiah 65 Sen berdasarkan hasil perhitungan antara sisi Pendapatan dan sisi Beban pada Laporan Operasional.

***Rapat Paripurna dan hadirin sekalian yang kami hormati,***

Selain saran, pendapat dan pertanyaan yang sama tersebut, dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

**I. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

1. Dari sisi pendapatan daerah diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan saat ini belum memenuhi target yang ditetapkan dengan target sebesar 1 Triliun 25 Miliar 586 Juta 55 Ribu 284 Rupiah, terealisasi sebesar 838 Miliar 906 Juta 956 Ribu 543

Rupiah 89 Sen atau 81,80%. Yang terdiri dari Pajak Daerah, target sebesar 476 Miliar 666 Juta 164 Ribu 778 Rupiah, realisasi sebesar 454 Miliar 120 Juta 555 Ribu 692 Rupiah atau 95,27% dan Retribusi Daerah target sebesar 119 Miliar 529 Juta 323 Ribu 105 Rupiah, realisasi sebesar 34 Miliar 597 Juta 374 Ribu 72 Rupiah atau 28,94%. Terkait hambatan dan tantangan yang tidak tersampaikan dengan transparan yang seharusnya didasarkan pada data, potensi pendapatan yang sampai saat ini tidak disampaikan oleh dinas penghasil, nonsense bicara optimalisasi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa didasari data potensi pendapatan. Perangkat daerah penghasil terkesan tidak serius dalam melaksanakan komitmen terhadap pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Rekomendasi DPRD hanya catatan tanpa aksi nyata terbukti realisasi PAD dari tahun ke tahun yang tidak menunjukkan progres report yang signifikan. Terbaca bahwa capaian indikator kinerja tidak optimal meskipun secara jumlah pendapatan naik namun secara target tidak tercapai. Pay Payment/pembayaran retribusi pajak harus tersistem, SiPanji, dioptimalkan dan harus ada sosialisasi diantara pengusaha, birokrasi, penegak hukum agar semua mengawasi. Meningkatkan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan dengan melakukan inventarisasi BMD. E-BMD dioptimalkan sebagai pengamanan Barang Milik Daerah. Badan Pendapatan daerah menggunakan strategi untuk perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan fokus membangun sistem yang terintegrasi di semua PD terkait, menggali potensi kembali (riset) PAD bagaimana dikelola secara profesional dan optimal. Perlu juga dievaluasi BUMD yang kontribusinya terhadap PAD minim jika dibandingkan dengan penyertaan modalnya. Perkembangan di Tahun 2023 BPR Artha Kanjuruhan, perlu ditinjau kembali untuk memaksimalkan kinerja, berinovasi, dan pengembangan teknologi informasi.

2. Dari sisi belanja daerah dihadapkan pada tingginya kebutuhan yang tidak seimbang dengan fiskal, serapan belanja tinggi tapi belum membantu menyelesaikan masalah dan belum bisa melayani masyarakat sesuai harapan. Angka serapan tinggi tapi tidak berbanding lurus dengan output/indikator kinerja yang ditargetkan pada setiap perangkat daerah, secara kuantitatif terealisasi optimal tapi dari aspek kualitatif tidak sesuai harapan.
3. Dari segi pembiayaan, permasalahan utama penerimaan dan pengeluaran dapat dijelaskan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai objek dan rinciannya. Pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan berkesinambungan sehingga fiskal dapat terjaga.
4. Dari segi administratif pertanggungjawaban APBD bagus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut, namun tidak berimplikasi pada aksi terbukti masih banyak masalah yang belum terselesaikan sesuai target, diantaranya masih tingginya angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, pendidikan dan kesehatan yang cukup memprihatinkan.
5. Program kegiatan dan alokasi APBD yang sudah dilaksanakan belum menunjukkan ke arah “Pembangunan Pariwisata Kreatif (Pariwisata dan Industri Kreatif) Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal” yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## **II. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Untuk maksimalisasi PAD dari aspek pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Malang harus selalu melakukan minimal 3 langkah strategis yaitu :
  - 1) Intensifikasi dengan memaksimalkan administrasi dan teknologi aplikasi SiPanji dengan mudah untuk membayar pajak,dll.
  - 2) Ekstensifikasi dengan mencari terobosan-terobosan sasaran objek pajak dan retribusi baru.

- 3) Inovasi dengan sentuhan teknologi terkini, misalnya setiap rumah makan dan lahan parkir dipasang alat video rekam (TAPING BOX) sebanyak mungkin.
2. Terkait BUMD Bank Artha Kanjuruhan, agar Pemerintah Kabupaten Malang berupaya untuk meningkatkan kelas menjadi bank milik Pemerintah Kabupaten yang bias melayani dengan maksimal untuk transaksi jasa keuangan semua masyarakat Kabupaten Malang, baik pegawai dan masyarakat umum, dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang terprogram dengan professional. Dengan harapan untuk bias menambah PAD pada kondisi saat ini sudah jalan.
3. Mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Malang sebagai petani, mohon Pemerintah Kabupaten meningkatkan anggaran pertanian pada setiap tahun anggaran untuk menuju petani makmur.

### **III. Fraksi Partai Golongan Karya**

1. Pencapaian target PAD khususnya retribusi daerah sangat rendah yakni kurang lebih 28.94%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serius karena 2 tahun berturut turut hal itu terjadi. Apakah targetnya terlalu tinggi tidak sesuai potensi, atau memang faktor yang lain. Keseriusan perangkat daerah dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat pada saat kajian LKPJ oleh perguruan tinggi banyak kepala perangkat daerah yang tidak hadir, dan hanya diwakili oleh pejabat dibawahnya.
2. Untuk mensukseskan visi misi Pemerintah Kabupaten Malang yang tercakup dalam “Malang Makmur”, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah. Tanggung jawab tersebut tidak hanya didominasi oleh beberapa perangkat daerah tertentu saja, yang diyakini bahwa perangkat daerah tersebut programnya dapat mengungkit keberhasilan program program Perangkat Daerah yang lain. Oleh karena itu pada posisi belanja daerah diperlukan pencermatan kembali terhadap alokasi anggaran program masing masing organisasi perangkat daerah. Prioritas alokasi anggaran Kabupaten Malang masih dominan di infrastruktur, belum

memperhatikan secara proporsional alokasi anggaran pada perangkat daerah yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat seperti, pertanian secara luas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk ,Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata lain dan sebagainya

#### **IV. Fraksi Partai Nasional Demokrat**

1. Pemenuhan target PAD perlu upaya yang luar biasa dalam mewujudkan target yang ingin di capai. Beberapa kali Pemerintah Kabupaten Malang belum mampu memenuhi beberapa poin target dari PAD. Pencermatan khusus untuk menyoroti beberapa gagalnya target capaian PAD ini, perlu untuk di teliti dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Malang.
2. Dari segi belanja, perlu di kaji pula terkait efektifitas dan upaya mengoptimalkan ruang fiskal yang ada. Seluruh belanja Pemerintah Kabupaten Malang harus membawa daya ungkit bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Malang dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kajian antara serapan anggaran dan dampak-manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Malang harus terpaparkan dengan baik pada pertanggungjawaban APBD tahun 2023.

#### **V. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**

1. Menyampaikan apresiasi dan selamat atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 dengan harapan opini WTP dapat diraih untuk memotivasi lebih baik lagi kedepan.
2. Pada sisi pendapatan, dalam rangka intensifikasi sumber-sumber PAD, salah satunya adalah dengan lebih memaksimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah termasuk piutang daerah, khusus untuk penagihan piutang daerah perlu dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah Pemungut dengan Inspektorat dan BKAD sehingga dapat diterapkan sistem penagihan yang lebih baik.

Piutang daerah tahun 2023 lumayan tinggi berkisar 80 sampai 100 milyar.

Berkaitan dengan hal tersebut terkait dengan piutang yang sudah tidak potensial lagi atau tidak dapat dilakukan penagihan yang disebabkan beberapa faktor maka perlu dilakukan konsultasi kepada pihak terkait kiranya dapat dilakukan pemutihan atau penghapusan.

### ***Rapat paripurna dan Hadirin Yang Berbahagia,***

Demikian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 pada hari ini, mudah-mudahan beberapa catatan di atas dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan berikutnya antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang, serta sebagai evaluasi untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun yang akan datang. Adapun hal-hal yang masih belum tersampaikan pada hari ini, akan dibahas lebih mendalam saat dilaksanakan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sebelum saya akhiri, tak lupa sy sampaikan, kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Malang tentunya sangat bersyukur atas diraihnya penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas peran serta dalam mewujudkannya.

Semoga apa yang telah kita capai senantiasa menjadi penyemangat dan pendorong untuk mempertahankan dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Malang, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga opini tersebut tidak hanya berdampak pada sisi administratif saja tetapi juga pada sisi sosial dan ekonomi masyarakat yang nyata.

Akhir kata, kami atas nama pribadi dan selaku juru bicara fraksi-fraksi DPRD, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian disertai permohonan maaf apabila dalam penyampaian

kami terdapat tutur kata, sikap dan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan ridho-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.

Sekian dan terima kasih,

Wabillahi Taufik-Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi-Wabarakatuh

Kepanjen, 15 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**KABUPATEN MALANG**

**KETUA,**

**JURU BICARA**

**DARMADI, S.Sos.**

**Ir. SUDJONO**

***BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,***

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KEPADA SAUDARA SUDJONO, M.P DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA :

PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023,  
AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 22 MEI 2024.

***RAPAT PARIPURNA DPRD, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN  
SEKALIAN,***

DENGAN DEMIKIAN, SELESAI SUDAH SELURUH AGENDA RAPAT  
PARIPURNA HARI INI. ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI  
SAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG  
BERKENAN KAMI MOHON MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR  
***“ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN”*** RAPAT PARIPURNA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN  
DITUTUP .....**TOK !!!!( 3X )**

***SEKIAN DAN TERIMA KASIH,***

***WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ***

***WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.***

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
KETUA

**DARMADI, S.Sos**